



BENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi kelanjutan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang periode 3 Bulan di Triwulan IV Tahun 2023 untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini dapat memberikan banyak manfaat, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dan umumnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta sektor terkait lainnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas peran sertanya dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua.

Serang, September 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SERANG,



NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM

NIP. 196404241985031015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan hukum	3
1.3. Maksud dan tujuan	6
1.4. Sistematika penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RESNTRA PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2023	8
2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

2.1.1	Evaluasi Hasil Renja BPBD Kabupaten Serang TW II Tahun Anggaran 2023	9
2.1.2	Realisasi Anggaran TW II Tahun Anggaran 2023 BPBD Kabupaten Serang	13
2.2.	Target dan Pencapaian Kinerja BPBD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026..	16
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023 BPBD Kabupaten Serang	21
3.1.	Pagu Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Sesuai Ranwal RKPD Perubahan Tahun 2023.....	30
3.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 BPBD Kabupaten Serang.....	32
3.3.	Usulan Penambahan Anggaran Perubahan Tahun 2023 BPBD Kabupaten Serang	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, yaitu disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran dalam 1 tahun terdapat 2 kali penyusunan dokumen, yaitu penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran murni serta penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran perubahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Serang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Serang, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Serang yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya di Sub Urusan

Penanggulangan Bencana. Tahun 2023 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut, dan saat dokumen ini disusun sedang memasuki tahapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Renja PD atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja PD mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di unit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra PD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Kualitas penyusunan Perubahan Renja PD akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Perubahan Renja PD tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang di anggaran perubahan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Serang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Serang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2023 tentang APBD Perubahan Kabupaten Serang TA 2023;
22. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
23. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;

24. Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Serang;
25. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis OPD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Serang Nomor 299 Tahun 2023 tentang APBD Perubahan Kabupaten Serang TA 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah :

1. Sebagai dokumen perubahan Perencanaan Jangka Pendek yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada masa perubahan anggaran dengan tetap mengacu dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Serang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Memberikan arah dan pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan untuk perubahan anggaran dalam menentukan prioritas-prioritas di bidang kebencanaan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang dalam upaya meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Serang.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2023 adalah :

1. Menjabarkan rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang di Perubahan Anggaran tahun 2023;
2. Menetapkan perubahan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi

pencapaian kinerja yang optimal apabila terdapat perubahan kebijakan di anggaran perubahan;

3. Sebagai arah dan acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
4. Sebagai acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
5. Untuk keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
6. Mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Landasan hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan; dan
- 1.4. Sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan capaiannya;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA BPBD Kabupaten Serang Triwulan II Tahun 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya di Sub Urusan Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dilaksanakan cukup baik, meskipun ada beberapa kendala akan tetapi masih dapat teratasi dengan baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian dari rencana kegiatan dengan pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran.

Dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 bahwa prosentase rata-rata capaian kinerja mencapai 43,36 %. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat dilihat pada tabel 2.1.1 dibawah.

Tabel 2.1.1

EVALUASI HASIL RENJA																												
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG																												
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023																												
No	Daerah	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja sasaran/Program (Outcome)/ kegiatan (Output)		Target RENSTRA pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RKPD Tahun 2022 (2021+2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(%)		Perangkat Daerah penanggungjawab
												Indikator (output)		satuan		K		Rp										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 12/7*100	14=6+12	15=(14/5)*100%	16									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																									BPBD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				862.446.722		119.371.291		146.614.640																	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	32	417.145.000	11	61.292.000	5	65.453.140	1	13.576.900	1	9.135.400			2	22.712.300	40,00	34,70	13	84.004.300	40,63	20,14			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen	6	311.356.722	2	58.079.291	1	52.216.500		3.176.000		9.761.500			0	12.937.500	-	24,78	2	71.016.791	33,33	22,81			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	133.945.000	0	-	1	28.945.000	0	-	0	0				-	-	-		-	0,00	0,00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.790.813.739		15.260.923.064		8.374.022.754																	
			Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di BPBD Kabupaten Serang	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	4296	46.556.310.723	1368	15.260.923.064	684	8.315.397.000	168	1.462.671.581	168	2.617.352.839			336	4.080.024.420	49,12	49,07	1704	19.340.947.484	39,66	41,54			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	48	234.503.016	0	-	12	58.625.754	3	9.259.228	3	15.988.842			6	25.248.070	50,00	43,07	6	25.248.070	12,50	10,77			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				943.466.104		341.426.104		152.777.262																	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	72	933.466.104	24	334.026.104	12	152.777.262	3	27.777.684	3	41.666.526			6	69.444.210	50,00	45,45	30	403.470.314	41,67	43,22			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	10	10.000.000	10	7.400.000	0	-											10	7.400.000	100,00	74,00			

Realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023 BPBD Kabupaten Serang

NO.	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.453.140	22.712.300	34,70
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.216.500	12.937.500	24,78
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.945.000	-	-
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.315.397.000	4.080.024.420	49,07
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	58.625.754	25.248.070	43,07
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	152.777.262	69.444.210	45,45
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.470.140	-	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.429.400	-	-
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.142.100	42.244.101	85,96
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.659.800	15.757.500	53,13
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.340.800	26.625.800	44,87
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.267.500	147.413.000	54,75
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.298.631	13.888.842	16,28
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	367.000.000	219.216.625	59,73
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.677.485	94.509.940	52,60

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.143.977	19.751.035	27,38
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.647.800	153.768.150	42,76
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.383.700	4.816.825	51,33
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.444.800	-	-
20	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.467.912.540	650.760.700	44,33
21	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	300.181.508	123.256.140	41,06
22	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	200.325.000	89.060.000	44,46
23	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	175.328.770	79.240.350	45,20
24	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.390.568.532	611.370.525	43,97
25	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	849.961.508	364.206.140	42,85
26	Pendataan Saran Prasarana Proteksi Kebakaran	355.314.663	156.307.244	43,99
JUMLAH TOTAL		<u>14.936.913.310</u>	<u>7.022.559.417</u>	<u>47,01</u>

2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah maka perlu dilakukan analisis kinerja perangkat daerah dengan membandingkan target dalam RENSTRA Perangkat Daerah dan capaian realisasi kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diketahui apakah capaian kinerja pelayanan perangkat daerah mengalami peningkatan atau penurunan di setiap tahunnya.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai realisasinya untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah tiap tahunnya. Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Target dan Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	TW II Tahun 2023*	
1	Indeks Risiko Bencana	Score	203,10	203,05	203	202,80	202,50	200	176,14	154,18	*Akan dikeluarkan BNPB akhir 2023	Realisasi kinerja melebihi target (semakin rendah semakin baik)

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa meskipun score Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Serang menurun sebanyak 26,96 point akan tetapi Indeks Risiko Bencana di wilayah Kabupaten Serang masih tetap berada pada level resiko bencana tinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang harus berupaya lebih keras untuk menurunkan score tingkat resiko bencana dan hal ini harus melibatkan beberapa OPD terkait yang akan sangat terlihat keterlibatannya dalam pengisian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang cukup berpengaruh dalam menurunkan score Indeks Risiko Bencana (IRB).

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Tantangan dan peluang

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran.
2. Kurangnya dukungan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran.
3. Pemenuhan pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran berkaitan dengan luas wilayah yang harus dipenuhi kebutuhannya terkadang menjadi kendala dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, personil serta anggaran.

Peluang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah sudah terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana), Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) dan relawan di beberapa desa dan kecamatan serta telah terjalinnya kerjasama yang baik dengan dunia usaha sehingga penanggulangan bencana dan kebakaran dapat terbantu dan teratasi oleh personil dan sarana dan prasarana dari dunia usaha meskipun dengan kondisi kekurangan anggaran dan sarana prasarana.

2.3.2 Isu strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus sesegera mungkin dilaksanakan.

Isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2021-2026 sesuai RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat;**
2. **Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;**
3. **Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah;**

4. **Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran;**
5. **Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;**
6. **Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif;**
7. **Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;**
8. **Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan);**
9. **Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah;**
10. **Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh;**
11. **Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan;**
12. **Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai.**

Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Serang dalam lima tahun hendaknya harus memperhatikan isu-isu strategis tersebut di atas agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta mewujudkan peran dan fungsi daerah baik dalam hirarkhinya di lingkup regional dan nasional, maupun lingkup internal Kabupaten Serang sendiri.

Sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok fungsi yang dipegang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah di Nomor 5 yaitu **Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Permasalahan yang teridentifikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia baik untuk aparatur ataupun masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

- dan kebakaran;
- 2. Belum tersedianya dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon);
- 3. Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- 4. Perlu adanya peningkatan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 6. Perlu adanya peningkatan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi (penanganan pasca bencana) yang berasal dari anggaran daerah;
- 7. Masih kurangnya pemahaman prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berkaitan dengan rumusan isu strategis di RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, dan sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, maka isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Kesiapan aparatur dan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kebakaran;
- 2. Kesiapan tanggap darurat bencana dan kebakaran;
- 3. Response time atas setiap penanggulangan kejadian;
- 4. Ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung operasi dari setiap kegiatan.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023

Rumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang pada Perubahan RKPD tahun 2023 sudah sesuai dengan fungsi dan tugas pokok perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026.

Rencana program dan kegiatan di anggaran perubahan tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 ini anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang terdapat rasionalisasi atau pengurangan anggaran untuk Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp 294.127.246,- sehingga jumlah pagu anggaran dari Rp. 14.936.913.310,- menjadi Rp 14.642.786.064.- dan berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran Perubahan tahun 2023 masih terdapat kekurangan anggaran untuk pembayaran honor bulanan dan piket non ASN untuk bulan Desember 2023, serta kebutuhan anggaran untuk pemenuhan SPM sub urusan bencana dan kebakaran dalam hal Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan pengadaan Sarpras Alat Pelindung Diri Anggota Rescue Damkar. Berikut ini adalah review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023.

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023
BPBD KABUPATEN SERANG

No.	Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp)		Kebutuhan Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	CATATAN PENTING
					Sebelum perubahan	Setelah Perubahan	Murni 2023	RKPD Perubahan 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
I	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10.197.320.789	9.933.993.543		10.366.093.734	
1	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					146.614.640	99.551.398		99.551.398	
1	5.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	5	5	65.453.140	40.235.456		40.235.456	
2	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah	dok	1	1	52.216.500	39.936.500		39.936.500	
3	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	1	1	28.945.000	19.379.442		19.379.442	
2	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.374.022.754	8.249.625.754		8.254.322.040	
4	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bln	56	54	8.315.397.000	8.191.000.000		8.191.000.000	

5	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan terlaksananya pembayaran honor staff subbag Keuangan	lap	11	12	58.625.754	58.625.754	4.696.286	63.322.040	kekurangan honor bulanan 2 orang staff subbag keuangan untuk bulan desember
3	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					152.777.262	152.777.262		166.866.120	
6	5.01.01.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan terlaksananya pembayaran honor Pramubakti	dok	11	12	152.777.262	152.777.262	14.088.858	166.866.120	kekurangan honor bulanan 6 orang Pramubakti untuk bulan desember
4	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					423.309.740	408.126.915		530.987.555	
7	5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	12	5.470.140	5.360.640	5.360.640	10.721.280	Komponen Listrik masih kurang untuk mengakomodir kebutuhan BPBD, Pos damkar di 4 Kecamatan dan Pos Sar di 1 Kecamatan
8	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	12	12	10.429.400	10.429.400	2.500.000	12.929.400	masih kurang untuk mengakomodir kebutuhan BPBD, Pos damkar di 4 Kecamatan dan Pos Sar di 1 Kecamatan
9	5.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	12	49.142.100	46.174.200	20.000.000	66.174.200	untuk mengakomodir kebutuhan ATK TW IV

10	5.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	12	29.659.800	25.579.000	10.000.000	35.579.000	untuk mengakomodir kebutuhan fotocopy TW IV
11	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	lap	12	12	59.340.800	57.324.800	25.000.000	82.324.800	Perlu adanya penambahan karena di koring ini untuk memenuhi kunjungan tamu dari luar daerah (BNPB dan Kemendagri), serta Air minum Galon biat BPBD dan Pos yang ada di kecamatan
12	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap	12	12	269.267.500	263.258.875	60.000.000	323.258.875	Tambahan untuk makan minum lapangan dan SPPD Luar daerah realisasi sudah 80%
5	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					631.976.116	628.770.537		761.555.681	
13	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan terlaksananya pembayaran honor tenaga Administrasi umum dan Kepegawaian	lap	11	12	85.298.631	84.333.052	7.044.429	91.377.481	kekurangan honor bulanan 3 orang staff subbag UMPEG untuk bulan desember

14	5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	lap	12	12	367.000.000	367.000.000	85.000.000	452.000.000	Tambahan untuk Media, Pembayaran Listrik dan Internet yang masih kurang
15	5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan pembayaran honor staff administrasi Subbag Umum & Petugas Kebersihan	lap	11	12	179.677.485	177.437.485	40.740.715	218.178.200	Untuk HUT RI + HUT Kabupaten Serang dan kekurangan honor bulanan 2 orang OB + 2 orang staff Administrasi Umum untuk bulan Desember
6	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					468.620.277	395.141.677		552.810.940	
16	5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya serta terlaksananya pembayaran honor driver Esselon II	unit	22	22	72.143.977	48.143.977	52.669.263	100.813.240	Untuk kekurangan honor bulanan 1 Orang driver Esselon II Bulan Desember serta pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, tidak digunakan untuk jabatan akan tetapi untuk Operasional Lapangan

17	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	20	20	359.647.800	312.197.800	75.000.000	387.197.800	Untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lapangan dan Unit Damkar, kondisi kendaraan di atas 7 Tahun dan digunakan setiap penanganan
18	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	21	26	9.383.700	7.355.100	10.000.000	17.355.100	Untuk pemeliharaan komputer, laptop dan Printer sangat kurang, untuk mengakomodir 4 bidang dan sekretariat
19	5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	25	30	27.444.800	27.444.800	20.000.000	47.444.800	Untuk Pemeliharaan instalasi Listrik dan air yang belum diakomodir di anggaran Murni
II	5.01.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.143.747.818	2.143.747.818		2.467.484.680	
7	5.01.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								89.570.000	

20	5.01.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana	orang	-	200	-	-	89.570.000	89.570.000	Sub Kegiatan pendukung SPM
8	5.01.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1.768.094.048	1.768.094.048		1.927.819.480	
21	5.01.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran honor dan piket anggota PUSDALOPS & TRC	bln	11	12	1.467.912.540	1.467.912.540	133.002.860	1.600.915.400	kekurangan honor dan jasa piket 76 orang anggota TRC & PUSDALOPS bulan Desember
22	5.01.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran honor petugas gudang logistik	bln	11	12	300.181.508	300.181.508	26.722.572	326.904.080	kekurangan honor dan piket 15 orang petugas Sarpras & Logistik bulan Desember
9	5.01.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					375.653.770	375.653.770		450.095.200	
23	5.01.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksananya pembayaran jasa piket anggota HUMAS	Dok	11	12	200.325.000	200.325.000	18.260.000	218.585.000	kekurangan jasa piket 12 Orang anggota HUMAS bulan Desember

24	5.01.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran honor petugas survey pasca bencana	bln	11	12	175.328.770	175.328.770	56.181.430	231.510.200	kekurangan honor bulanan 10 orang petugas Survey Lokasi Pascabencana bulan Desember
III	5.01.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.595.844.703	2.565.044.703		2.997.755.994	
10	5.01.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.240.530.040	2.209.730.040		2.611.124.757	
25	5.01.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran honor dan piket anggota DAMKAR	bln	11	12	1.390.568.532	1.359.768.532	124.862.145	1.484.630.677	kekurangan honor dan jasa piket 74 orang anggota DAMKAR bulan Desember
26	5.01.04.2.01.02	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya pembayaran honor dan piket anggota RESCUE DAMKAR	bln	11	12	849.961.508	849.961.508	74.032.572	923.994.080	kekurangan honor dan jasa piket 47 orang anggota RESCUE DAMKAR bulan Desember
27	5.01.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (APD)	Terpenuhinya APD Pemadam Kebakaran sebanyak 10 Unit dan tempat penyimpanan	unit	0	10	-	-	202.500.000	202.500.000	Pemenuhan APD Damkar (Fire Fighting Nomex III A Orange)

11	5.01.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					355.314.663	355.314.663		386.631.237	
28	5.01.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya pembayaran honor petugas penarik retribusi APK	bln	11	12	355.314.663	355.314.663	31.316.574	386.631.237	kekurangan honor bulanan 18 orang petugas pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan APK bulan Desember
			TOTAL				<u>14.936.913.310</u>	<u>14.642.786.064</u>	<u>1.188.548.344</u>	<u>15.831.334.408</u>	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut ini adalah jumlah pagu anggaran Rancangan Awal Perubahan Anggaran Tahun 2023 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

Tabel 3.1.
Pagu Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang Sesuai Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2023 SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN
			Refocusing	
1	BPBD	14.936.913.310	(294.127.246)	14.642.786.064

Pagu anggaran Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah sebesar **Rp 14.642.786.064,-** dimana didalamnya sudah termasuk Belanja Barang Dan Jasa serta Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. Dengan jumlah pagu anggaran tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pagu anggaran perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2023, dikarenakan masih ada kekurangan anggaran untuk pembayaran honor bulanan, honor jasa piket, tunjangan Non PNS dan BPJS Non PNS Bulan Desember tahun 2023.

Dengan berkurangnya jumlah pagu anggaran rancangan awal RKPD perubahan tahun 2023 maka mengakibatkan adanya perubahan target pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan anggaran perubahan tahun 2023 termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Kinerja			Pagu (Rp.)			Bertambah (+) / Berkurang (-) (Rp.)
			Renja	Sebelum perubahan	Perubahan Renja	Murni	Refocussing	Perubahan Renja	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						10.197.320.789	10.095.791.305	9.933.993.543	(161.797.762)
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						146.614.640	132.581.969	99.551.398	(33.030.571)
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	5	5	5	65.453.140	58.037.860	40.235.456	(17.802.404)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah	dok	1	1	1	52.216.500	48.367.109	39.936.500	(8.430.609)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	1	1	1	28.945.000	26.177.000	19.379.442	(6.797.558)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.374.022.754	8.374.022.754	8.249.625.754	(124.397.000)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bln	56	56	54	8.315.397.000	8.315.397.000	8.191.000.000	(124.397.000)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan terlaksananya pembayaran honor staff subbag Keuangan	lap	11	11	11	58.625.754	58.625.754	58.625.754	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						152.777.262	152.777.262	152.777.262	-

Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan terlaksananya pembayaran honor Pramubakti	dok	11	11	11	152.777.262	152.777.262	152.777.262	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah						423.309.740	406.835.211	408.126.915	1.291.704
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	12	12	5.470.140	5.360.640	5.360.640	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	12	12	12	10.429.400	10.429.400	10.429.400	-
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	12	12	49.142.100	45.222.001	46.174.200	952.199
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	12	12	29.659.800	25.579.000	25.579.000	-
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	lap	12	12	12	59.340.800	57.324.800	57.324.800	-
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	lap	12	12	12	269.267.500	262.919.370	263.258.875	339.505
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						631.976.116	630.611.057	628.770.537	(1.840.520)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan terlaksananya pembayaran honor TTK	lap	11	11	11	85.298.631	84.333.052	84.333.052	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	lap	12	12	12	367.000.000	367.000.000	367.000.000	-

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan pembayaran honor staff administrasi Subbag Umum & Petugas Kebersihan	lap	11	11	11	179.677.485	179.278.005	177.437.485	(1.840.520)
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						468.620.277	398.963.052	395.141.677	(3.821.375)
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	22	22	22	72.143.977	48.143.977	48.143.977	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	20	20	20	359.647.800	316.190.090	312.197.800	(3.992.290)
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	21	21	21	9.383.700	7.184.185	7.355.100	170.915
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	25	25	25	27.444.800	27.444.800	27.444.800	-
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.143.747.818	2.143.747.818	2.143.747.818	-
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						1.768.094.048	1.768.094.048	1.768.094.048	-
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran honor dan piket anggota PUSDALOPS & TRC	bln	11	11	11	1.467.912.540	1.467.912.540	1.467.912.540	-
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran honor petugas gudang logistik	bln	11	11	11	300.181.508	300.181.508	300.181.508	-

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						375.653.770	375.653.770	375.653.770	-
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dok	11	11	11	200.325.000	200.325.000	200.325.000	-
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran honor petugas survey pasca bencana	bln	11	11	11	175.328.770	175.328.770	175.328.770	-
PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						2.595.844.703	2.595.844.703	2.565.044.703	(30.800.000)
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.240.530.040	2.240.530.040	2.209.730.040	(30.800.000)
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembayaran honor anggota DAMKAR	bln	11	11	11	1.390.568.532	1.390.568.532	1.359.768.532	(30.800.000)
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya pembayaran honor anggota RESCUE DAMKAR	bln	11	11	11	849.961.508	849.961.508	849.961.508	-
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						355.314.663	355.314.663	355.314.663	-
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya pembayaran honor petugas penarik retribusi APK	bln	11	11	11	355.314.663	355.314.663	355.314.663	-
	TOTAL					<u>14.936.913.310</u>	<u>14.835.383.826</u>	<u>14.642.786.064</u>	<u>(192.597.762)</u>

Dikarenakan masih adanya kekurangan anggaran untuk pembayaran honor bulanan, honor jasa piket, tunjangan Non PNS dan BPJS Non PNS Bulan Desember tahun 2023, serta himbauan untuk menganggarkan sub kegiatan pendukung SPM yang tidak teranggarkan di anggaran murni maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar **Rp 1.188.548.344,-** untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Serang juga sedang kurang baik maka usulan penambahan anggaran pun hanya ditujukan untuk kebutuhan yang prioritas saja.

Berikut ini adalah rincian usulan permohonan penambahan anggaran perubahan Tahun 2023.

Tabel 3.3.
USULAN PENAMBAHAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SERANG

PRIORITAS I						
Kode Rekening	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Pagu (Rp.)			Kekurangan Anggaran (Rp)
			Murni 2023	Refocussing I	Sesuai SIPD RKPD Perubahan 2023	
2	3	4	5	6	7	8
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	kekurangan honor bulanan 2 orang staff subbag keuangan untuk bulan Desember	58.625.754	58.625.754	58.625.754	4.696.286
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	kekurangan honor bulanan 6 orang Pramubakti untuk bulan desember	152.777.262	152.777.262	152.777.262	14.088.858
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kekurangan honor bulanan 3 orang staff subbag UMPEG untuk bulan desember	85.298.631	85.298.631	85.298.631	7.044.429

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	kekurangan honor bulanan 2 orang OB + 2 orang staff Administrasi Umum untuk bulan Desember	179.677.485	179.677.485	177.437.485	9.392.572
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Untuk kekurangan honor bulanan 1 Orang driver Eselon II Bulan Desember	72.143.977	72.143.977	72.143.977	2.669.263
5.01.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
5.01.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pendukung SPM Sub Urusan Bencana	-	-	-	89.570.000
5.01.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
5.01.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	kekurangan honor dan jasa piket 76 orang anggota TRC & PUSDALOPS bulan Desember	1.467.912.540	1.467.912.540	1.467.912.540	133.002.860
5.01.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	kekurangan honor dan piket 15 orang petugas Sarpras & Logistik bulan Desember	300.181.508	300.181.508	300.181.508	26.722.572
5.01.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
5.01.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	kekurangan jasa piket 12 Orang anggota HUMAS bulan Desember	200.325.000	200.325.000	200.325.000	18.260.000
5.01.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	kekurangan honor bulanan 10 orang petugas Survey Lokasi Pascabencana bulan Desember	175.328.770	175.328.770	175.328.770	16.181.430
5.01.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

5.01.04.2.01.03	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	kekurangan honor dan jasa piket 74 orang anggota DAMKAR bulan Desember	1.390.568.532	1.390.568.532	1.359.768.532	124.862.145
5.01.04.2.01.02	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	kekurangan honor dan jasa piket 47 orang anggota RESCUE DAMKAR bulan Desember	849.961.508	849.961.508	849.961.508	74.032.572
5.01.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					
5.01.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	kekurangan honor bulanan 18 orang petugas pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan APK bulan Desember	355.314.663	355.314.663	355.314.663	31.316.574
		TOTAL				<u>551.839.561</u>

PRIORITAS II

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan	Pagu (Rp.)			Kekurangan Anggaran (Rp)
			Murni 2023	Refocussing I	Sesuai SIPD RKPD Perubahan 2023	
2	3	4	5	6	7	8
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen Listrik masih kurang untuk mengakomodir kebutuhan BPBD, Pos damkar di 4 Kecamatan dan Pos Sar di 1 Kecamatan	5.470.140	5.360.640	5.360.640	5.360.640
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	masih kurang untuk mengakomodir kebutuhan BPBD, Pos damkar di 4 Kecamatan dan Pos Sar di 1 Kecamatan	10.429.400	10.429.400	10.429.400	2.500.000
5.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	untuk mengakomodir kebutuhan ATK TW IV	49.142.100	45.222.001	46.174.200	20.000.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	untuk mengakomodir kebutuhan fotocopy TW IV	29.659.800	25.579.000	25.579.000	10.000.000
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Perlu adanya penambahan karena di koring ini untuk memenuhi kunjungan tamu dari luar daerah (BNPB dan Kemendagri), serta Air minum Galon biat BPBD dan Pos yang ada di kecamatan	59.340.800	57.324.800	57.324.800	25.000.000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tambahan untuk makan minum lapangan dan SPPD Luar daerah realisasi sudah 80%	269.267.500	262.919.370	263.258.875	60.000.000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tambahan untuk Media, Pembayaran Listrik dan Internet yang masih kurang	367.000.000	367.000.000	367.000.000	85.000.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Untuk HUT RI + HUT Kabupaten Serang	179.677.485	179.278.005	177.437.485	31.348.143
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, tidak digunakan untuk jabatan akan tetapi untuk Operasional Lapangan	72.143.977	48.143.977	48.143.977	50.000.000
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lapangan dan Unit Damkar, kondisi kendaraan di atas 7 Tahun dan digunakan setiap penanganan	359.647.800	316.190.090	312.197.800	75.000.000
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Untuk pemeliharaan komputer, laptop dan Printer sangat kurang, untuk mengakomodir 4 bidang dan sekretariat	9.383.700	7.184.185	7.355.100	10.000.000
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Untuk Pemeliharaan instalasi Listrik dan air yang belum di akomodir di anggaran Murni	27.444.800	27.444.800	27.444.800	20.000.000
5.01.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
5.01.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Untuk kegiatan Monev pascabencana	175.328.770	175.328.770	175.328.770	40.000.000
5.01.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
5.01.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (APD)	Pemenuhan APD Damkar (Fire Fighting Nomex III A Orange)	-	-	-	202.500.000
		TOTAL				<u>636.708.783</u>
	GRAND TOTAL PRIORITAS I & II					<u>1.188.548.344</u>

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2023 akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2023 dengan mengikuti hasil pembahasan dokumen KUA PPAS dan RAPBD oleh TAPD.

Jumlah pagu anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang masih cukup jauh dari jumlah kebutuhan pagu anggaran yang dibutuhkan, sehingga penyusunan anggaran difokuskan pada sub kegiatan prioritas yang mendukung pelaksanaan kegiatan rutin kedinasan, serta penanganan bencana dan kebakaran.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang tahun 2023 ini disusun dengan harapan menjadi dokumen rujukan perencanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah yang aplikatif sehingga pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Serang dapat dilaksanakan berkelanjutan, tepat sasaran dan tepat guna untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Serang, September 2023

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN SERANG



NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM
NIP. 196404241985031015